

# Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu)

Asih Widi Lestari<sup>1\*</sup>, Gisela Mburu Amma<sup>2</sup>, Firman Firdausi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Department of Public Administration, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received May 3, 2024

Revised May 16, 2024

Accepted May 16, 2024

Available online May 25, 2024

### Keywords:

Direct Cash Assistance, Policy, Village Government.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

## ABSTRACT

Direct Cash Assistance (BLT) is direct assistance in the form of a certain amount of cash for households that really need it, namely households that are included in the very poor category. This program was launched by the government as social protection for the poor to reduce the negative impact of The policy of adjusting compensation to reduce fuel subsidies is to help poor people meet their basic needs. The objectives of this research are (1) to find out the implementation of the Direct Cash Assistance program policy in the Sidomulyo Village area, Batu District, Batu City. (2) to find out what are the supporting and inhibiting factors from the government of the village government in implementing the Direct Cash Assistance policy in Sidomulyo area, Batu District, Batu City. The type of research used by researchers is descriptive research with a qualitative research approach, the focus of the research is (1) Implementation of public policy (2) Direct Cash Assistance Program in Sidomulyo Village (3) Analysis of Van Meter and Van Horn so that the informants in this research are (1) Head of Sidomulyo Village, as general person in charge of the area. (2) Village Secretary as person in charge of administration (3) Head of the People's Welfare Section as person in charge of the Direct Cash Assistance Program in Sidomulyo Village.

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spirituan, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan Undang- Undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang di arahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mempunyai peran dalam proses maju dan berhasilnya pembangunan itu sendiri dengan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 1981 Tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin itu sendiri. Oleh Karena itu pemerintah banyak memperhatikan masyarakat kurang mampu dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk berbagai tindakan guna menanggulangi kemiskinan. Lalu di perjelas dengan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2005 Tentang program kebijakan pemerintah dalam hal Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana peraturan pemerintah ini bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan social-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (Utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk rumah tangga yang sangat membutuhkan, yakni rumah tangga yang termasuk dalam kategori sangat miskin, program ini dikuncurkan pemerintah sebagai perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah untuk membantu masyarakat miskin agar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dana tunai atau bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Dasar pemerintah dalam membuat kebijakan program BLT ini adalah untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang berada pada kelompok kedua (Menurut Bambang Heru) yang dengan pasti akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu BLT dilakukan sebagai kompensasi dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak kepada penduduk miskin.

Tidaknya ada lagi subsidi untuk BBM pada Tahun 2008 dinilai pemerintah akan dicangkan sebagai kompensasi bagi penduduk miskin. Ukuran keberhasilan yang dipakai oleh pemerintah sebagai pertimbangan harus mampu merubah standard kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga bias jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini di sebabkan karena latar belakang pemerikan beragam. Oleh karena itu, upaya meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kelurahan akan sangat desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak luputnya pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai diwilayah masing-masing. Implementasi kebijakan Bantuan langsung Tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemesdes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 180.000.000/Tahun untuk 50 penerima, sumber dari Dana Desa (DD). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin nonProgram Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapat manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020:1). Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

- 1) Tidak menerima PKH dan BPNT dan Kartu Kerja
- 2) Masyarakat yang tidak memiliki caadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup dan tidak mampu lagi untuk bekerja karena factor usia.
- 3) Masyarakat yang rentas sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula mereka menjadi penerima BLT-Dana Desa (BAPPENAS, 2020:8). Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari peraturan Menteri Desa Pembangunan desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No.6 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat didefinisikan masalah dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yaitu karena tingginya presentase kemiskinan, dilihat dari kondisi ekonomi di Desa Sidomulyo saat ini menurut sumber data yang didapatkan dari kantor Desa sebanyak 1.250 Orang berstatus belum bekerja/tidak bekerja, sebanyak 1.430 orang dengan status ibu rumah tangga, dan sebanyak 1.597 orang bekerja sebagai petani/pekebun. Sehingga diperlukannya Bantuan Langsung Tunai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai ini adalah sebuah kebijakan atau bantuan keuangan yang berasal dari desa untuk menanggulangi krisis keuangan masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Berangkat dari masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan BLT berdasarkan Analisis Van Meter dan Van Horn."

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:5) bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2016:7) Metode tugas akhir kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (Kurang terpola), dan disebut dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Jenis metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode tugas akhir naturalistic karena tugas akhirnya lakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk tugas akhir bidang antropologi budaya; disebut dengan metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih peniliti karena peneliti ingin mengetahui sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. metode pengumpulan data berupa cerita responden dan latar social yang ada dilokasi pelaksanaan.

Lokasi pelaksanaan adalah tempat pelaksanaan dilaksanakan serta lamanya pelaksanaannya. Tugas akhir ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pelaksanaan tugas akhir dilakukan pada bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024. Dalam tugas akhir kualitatif mengharuskan untuk menetapkan focus tugas akhir. Tujuannya adalah untuk memahami secara luas dan memahami secara luas dan memahami situasi luas dilapangan (Sugiyono, 2016-52). Dengan mentapkan fokus tugas akhir, maka dengan mudah melakukan analisis mendalam terkait

permasalahan yang terjadi. Adapun fokus tugas akhir ini yaitu: 1) Implementasi kebijakan, dan 2) Bantuan Langsung Tunai.

Teknik pengumpulan data dalam (Sugiyono 2016) menjelaskan mengenai bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam tugas akhir, karena tujuan utama dari tugas akhir adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka pelaksana tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabung dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada diantaranya adalah: Pelaksana menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder diantaranya: 1) Observasi: Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini, pelaksana dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan tugas akhir. Jadi mereka yang di teliti mengetahui sejak awal sampai akhir aktivis peneliti. Sugiyono (2016). 2) Wawancara, dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun menggunakan telepon. Jenis wawancara yang digunakan pelaksana adalah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang diceritakan informan. Supaya hasil wawancara dapat merekam dengan baik dan memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: Buku catatan, Tape recorder, dan kamera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. 3) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang ( Sugiyono, 2016).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) berdasarkan analisis Van Meter dan Van Horn di desa Sidomulyo**

Bantuan Langsung Tunai adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai reaksi atas melonjaknya harga minyak mentah dunia dan krisis ekonomi agar mampu membantu kalangan masyarakat miskin. Walaupun Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN setelah itu ke DD dan terakhir pemerintah desa salurkan ke pada masyarakat yang menjadi sasaran. Masyarakat miskin sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro 2002). Kemiskinan di definisikan sebagai ketidak mampuan secara ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ezzati Et.al (2020).

Seperti yang telah dijelaskan, penerima (BLT) diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa bersama RT/RW dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT kelurahan ini. (BAPPENAS, 2020: 8). Implementasi kebijakan program BLT ditujukan kepada masyarakat yang terdampak pemerintah desa sidomulyo berfokus pada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan tersebut maka dilakukan pendataan melalui RT/RW terhadap masyarakat yang kurang mampu sehingga program pemberian blt bisa tepat sasaran.

Dalam kebijakan ini ialah bantuan langsung tunai yang diberikan untuk masyarakat miskin untuk memenuhi dari sebagian kebutuhan dalam rumah tangga masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tidak mampu bekerja karena sakit (tiga bulan kedepan) dikarenakan kehilangan mata pencaharian kondisi kesehatan yang kurang baik. Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

### **Penerima manfaat bantuan langsung tunai di desa Sidomulyo**

Proses pembagian bantuan langsung tunai telah tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak untuk mendapat Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuannya untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai tidak lain adalah untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup.

Program Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai berikut: adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kesulitan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemendes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 180 Juta untuk 50 orang penerima atau tergolong keluarga miskin yang sesuai dengan hasil pendataan. Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin nonProgram Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020: 1). Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

1. Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
2. Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup.
3. Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini

Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa Permbangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) No. 1261/PRI.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain)
5. Penerangan tanpa Listrik
6. Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan)
7. Bahan bakar dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah
8. Konsumsi daging/ayam/susu hanya satu kali per minggu
9. Satu stel pakaian pertahun
10. Makan satu sampai dua kali perhari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Sumber penghasilan KK (Kartu Keluarga) petani berlahan kurang dari 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan
13. Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

Menurut Bapak Mahmudi, S.Pd selaku sekrataris desa mengatakan bahwa jumlah penerima bantuan langsung tunai berupa dana desa Rp 300.000 per orang yang di gunakan untuk kebutuhan keluarga penerima bantuan langsung tunai baik itu berupa BBM, bantuan langsung tunai, bantuan keluarga miskin dengan jumlah keseluruhan KK dari jumlah adalah 50 orang dan jumlah penerimaan.

Program Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek.

### **Pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Sidomulyo.**

Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan telah di persiapkan dengan baik lewat rapat koordinasi pemerintah desa bersama pendamping lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tuani tersebut bias tepat sasaran.

Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap suatu hal (syahida 2014:10). Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, ataupun penerapan kewajiban. Seperti yang telah dijelaskan, penerima (BLT) diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT kelurahan ini. (BAPPENAS, 2020: 8).

Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Masyarakat miskin sangat membutuhkan subsidi dari

pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro 2002). Kemiskinan di definisikan sebagai ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ezzati Et.al (2020).

Menurut Drs. Suharto, M.M Selaku kepala Desa Sidomulyo Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) di laksanakan berdasarkan prosedur yang telah di tetap dalam rapat koordinasi pemerintah beserta pendamping lapangan demi terlaksana nya komunikasi yang baik. Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksanaan Bantuan langsung Tunai (BLT), sehingga bisah jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu komunitas lainnya.

Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisah disamaratakan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini di sebabkan karena latar belakang pemerikan yang beragam. Oleh karena itu, upaya meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Kebijakan dari permasalahan utama dalam kebijakan publik, yakni kurangnya perhatian pada tahap implementasi. Model pendekatan Implementasi Kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatau pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan dan kinerja kebijakan public. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn yaitu:

### **Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosia-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Melonjaknya harga BBM dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat terlebih khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengkuncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari melonjaknya harga BBM dan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

### **Sumber daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menetukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Penyaluran

BLT di salurkan oleh pemerintah pusat BPNT dengan jumlah Rp. 900.000/ Tiga bulan setelah itu di salurkan ke APBN-DD, akan tetapi pemerintah desa menyalurkan bantuan tersebut setiap bulannya dengan jumlah Rp. 300.000/Bulan dan terakhir di berikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa: New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbang besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

### **Karakteristik organisasi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa penerapan proram Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidomulyo sudah terlaksana secara maksimal akan tetapi terkadang pecairan dana mengalami keterlambatan di karenakan lambatnya transfer dari dinas sendiri sehingga masyarakat yang menerima bantuan tersebut menerima dananya di bulan berikut atau di akhir bulan. Penerapan bantuan langsung tunai sudah tepat sasaran akan tetapi ada beberapa yang di wakili saat menerima bantuan tersebut da nada juga masyarakat yang tiidak bisa menerima langsung ke kantor desa di karenakan kondisi kesehatan sehingga pemerintah desa langsung mengantarkan ke tempatt atau rumah penerima.

Faktor pendukung dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai adalah ketersediaan anggaran, antosias masyarakat dan kerja keras pendamping lapangan sehingga proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan telah di persiapkan dengan baik lewat rapat koordinasi pemerintah desa bersama pendamping lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tunai tersebut bisa tepat sasaran. Sedangkan setempat, dalam pendataan pada masyarakat yang kurang mampu, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pedamping lapangan pada tahap implementasi penyaluran bantuan langsung tunai. Implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran

tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

## 5. ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi atas dukungannya, dan Desa Sidomulyo Kota Batu atas kesediaannya menerima penulis untuk melakukan penelitian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Moleong. Lexy J. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya
- Nugroho. 2008. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama, Penerbit Kencana. Jakarta.
- Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Solichin 2008. *Analisis Kebijaksaan dari formulasi keimplementasikebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.
- Thomas R 1992." *Understanding Public Policy*". New Jersey: Prentice Hall
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta. diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- William Dunn. 1995. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Univerrsity Press, 1995.
- Ardila, dkk. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng) *Akuntansi*, 2 (2) 139–148, (<https://journal.ugm.ac.id>), diakses 25 Desember 2014.
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making*. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston Kabupaten Jombang. *Universitas Brawijaya Malang*, 2(1).
- Setiawan, A. 2017. Implementasi *Optical Character Recognition* Tugas Dan Profesional Terhadap Kualitas, Diakses 25 Desember 2017.